



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jalan Imam Bonjol No. 50, TAREMPA 29791
Email : ptsp-naker@anambaskab.go.id

Tarempa, 07 April 2022

Kepada
Yth. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan
Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 104.a /Prog.045/04.2022

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Bersama ini kami kirimkan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Anambas.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

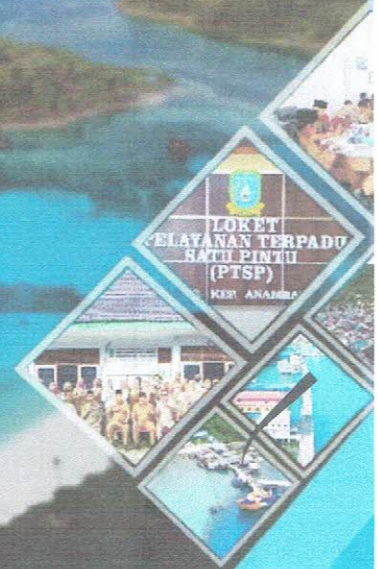
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



YUNIZAR, SE.,MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199803 1 009

Tanggal Terima :
Yang Menerima

NIP.



RENJA Rancangan Tahun 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

JL. Imam Bonjol No. 50, Tarempa, Siantan 29791
Kabupaten Kepulauan Anambas

Website : <https://ptsp.anambaskab.go.id>

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur *Alhamdulillahirabbil'alamin* dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanuata'ala., akhirnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023. Sesuai rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas telah tersusun berbagai tujuan, sasaran kebijakan, program. Selanjutnya rancangan Renja mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra), kemudian rancangan rencana kerja Tahun 2023 ini dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2023 agar pekerjaan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang lebih terarah dan terukur.

Renja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Penyusunan dokumen rancangan Renja ini merupakan tugas yang sangat penting dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan Rencana kerja yang dipaparkan merupakan rencana Perangkat Daerah pada satu tahun ke depan dengan memerhatikan pada berbagai kebutuhan masyarakat, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja,

Dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang tidak melenceng lagi dari rencana yang sudah ditetapkan ini. Semoga Allah Subhanuata'ala., selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua. Berbagai kelemahan yang terdapat dalam rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini akan dapat disempurnakan di kemudian hari.

Tarempa, 7 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



YUNIZAR, SE, M.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199803 1 009

DAFTARISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTARISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Landasan Hukum.....	3
C Maksud dan Tujuan.....	5
D Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021.....	8
A Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 Dan Capaian Renstra.....	8
B Permasalahan / Hambatan dan Pemecahan Masalah.....	13
C Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
D Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.....	21
E Permasalahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
A Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	25
B Tujuan dan SasaranRenja OPD.....	41
C Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB V PENUTUP.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dasar dari tahapan dan tata cara penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang pada hakikatnya dapat mempermudah setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahunan pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual Organisasi Perangkat Daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Di dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan Organisasi Perangkat Daerah, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Selain

itu, untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Renja Organisasi Perangkat Daerah juga memuat berbagai persoalan yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Usulan masyarakat tersebut terjaring pada saat berlangsungnya musyawarah perencanaan pembangunan atau yang dikenal dengan istilah musrenbang, yang pelaksanaannya dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Di dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta perkiraan maju. Indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai di dalam RPJMD, sedangkan pagu indikatif merupakan anggaran yang tersedia untuk mendanai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Untuk memenuhi amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53). urusan penanaman modal menjadi satu Perangkat Daerah dan sekaligus diamanahkan untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berdasarkan penyesuaian urusan tersebut, perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah menjadi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkewajiban menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan penyusunan Rancangan Renja untuk Tahun 2023 yang merupakan wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa dokumen perencanaan tahunan. Organisasi Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Selain itu, Renja pada Organisasi Perangkat Daerah ini harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2023, serta bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dan harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan tenaga Kerja.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. RENSTRA BKPM Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tahun 2016 – 2022.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2022;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas;
 13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas di Bidang Perizinan dan Nonperizinan;

14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2015 tentang
15. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 adalah:

- a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara khusus Renja ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
- c. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

- d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun ke depan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Tahun 2023 disusun dengan mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan dan dibagi ke dalam empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan RKPD Organisasi Perangkat Daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian ketiga dalam dokumen Renja ini akan dikemukakan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta rencana kerja dan anggaran program dan kegiatan perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Bab penutup menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanaan kegiatan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Evaluasi disini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada masing-masing program dan kegiatan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2021. Tabel 1 memperlihatkan alokasi APBD yang dikelola Perangkat Daerah baik sebelum perubahan anggaran maupun setelah perubahan anggaran.

Tabel 1. Alokasi APBD Jenis Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2021

No	Jenis Belanja	Pagu Dana		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Silpa (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)			
	BelanjaLangsung					
1	BelanjaLangsung	11.904.561.796	9.959.664.481	8,388.881.775	84,23	1.570.782,706

Sumber: Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021.

Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja belanja langsung sebesar Rp.11.904.561.796,- Angka ini mengalami Penurunan setelah terjadinya perubahan anggaran sebesar Rp 9.959.664,481,- Dari jumlah tersebut yang terealisasi sebanyak Rp.8.388.881,775- atau 84,23 Persen. Sehingga dapat diketahui besar selisih lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Tahun 2021 mencapai 1.570.782,706-

1. Realisasi Program dan Kegiatan Kegiatan yang Memenuhi Target Keluaran yang Direncanakan

Bila diperhatikan dari target masing-masing program ternyata satu program yang tidak berhasil diwujudkan karena refocussing anggaran seperti terlihat di dalam Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Uraian Kegiatan	JumlahPagu Dana Dalam DPAP	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Capaian Fisik (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		6.628.869.981	6.179.810.233	93,23	100
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	24.712.000	20.782.006	84,10	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.795.935.241	4.645.803.649	96,87	100
3	Administrasi barang Milik daerah	19.800.000	19.800.000	100	100
4	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	71.378.500	67.738.000	94,90	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.717.400	336.055.320	65,16	100
6	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.514.298	104.459.300	62,73	100
7	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	936.265.042	902.915.108	96,44	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	98.547.500	82.256.850	83,47	100
Urusan Bidang Penanaman Modal					
Program Promosi Penanaman Modal		78.591.000	19.208.000	24,44	31,15
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	78.591.000	19.208.000	24,44	31,15
Program Pelayanan Penanaman Modal		288.399.000	224.118.956	77,71	100
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota	288.399.000	224.118.956	77,71	100
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		486.820.000	261.473.433	53,71	100
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	486.820.000	261.473.433	53,71	100
UrusanKetenagaKerjaan					
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		1.312.277.000	913.115.545	69,58	100
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.312.277.000	913.115.545	69,58	100
Program Penempatan Tenaga Kerja					
1	Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0
Program Hubungan Industrial		1.164.707.500	791.155.608	67,93	100
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.008.279.500	703.319.292	69,75	94,58
2	Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	156.428.000	87.836.316	56,15	83,00

Sumber: DPAP dan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja T.A. 2021.

Dari kegiatan yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja Hasil /keluaran yang direncanakan yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini memiliki 8 kegiatan total anggaran sebesar Rp.6.628.869.981,- dan anggaran yang terealisasi Rp.6.179.810.233,- Indikator output programnya adalah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dari rencana anggaran Rp. 24.712.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.712.000,- atau 84,10 % dengan output tersedianya dokumen perencanaan selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100 %.
- 2) Administrasi keuangan Daerah dari rencana anggaran Rp. 4.795.935.241,- terealisasi sebesar Rp. 4.645.803.649,- atau 96,87 % dengan output tersedianya gaji dan administrasi serta penatausahaan keuangan selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100 %.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah dari rencana anggaran Rp.19.800.000,- terealisasi sebesar Rp.19.800.00,- atau 100 % dengan output terlaksananya penatausahaan Milik daerah selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100 %.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari rencana anggaran Rp.71.378.500,- terealisasi sebesar Rp.67.738.000,- atau 94,90 % dengan output tersedianya sarana dan prasarana pegawai selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100 %.
- 5) Administrasi Umum perangkat Daerah dari rencana anggaran Rp.515.717.400,- terealisasi sebesar Rp.336.055.320,- atau 65,16 % dengan output tersedianya peralatan perlengkapan kantor selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100 %.
- 6) Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari rencana anggaran Rp.166.514.298,- terealisasi sebesar

Rp.104.459.300,- atau 62,73% dengan output tersedianya peralatan dan gedung selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

7) Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran Rp.936.265.042,- terealisasi sebesar Rp.902.915.108,- atau 96,44 % dengan output tersedianya kebutuhan jasa surat, komunikasi sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

8) Pemeliharaan barang milik Daerah dari rencana anggaran Rp.98.547.500,- terealisasi sebesar Rp.82.256.850,- atau 83,47% jasa pemeliharaan selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini memiliki total anggaran Rp 78.591.000,- dan yang terealisasi Rp19.208.000,-. atau 24,44 Indikator output dari program ini adalah Terlaksananya Program Promosi Penanaman Modal .

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini memiliki total anggaran Rp288.399.000,- dan yang terealisasi Rp 224.118.956,- . Indikator output dari program ini adalah terlaksananya peningkatan Pelayanan Penanaman Modal. kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kota dari rencana anggaran Rp. Rp288.399.000,- terealisasi sebesar Rp 224.118.956,- atau 77,71%

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini memiliki total anggaran Rp486.820.000,- dan yang terealisasi Rp 261.473.433,- . Indikator output dari program ini adalah terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dari rencana anggaran Rp. Rp486.820.000,- terealisasi sebesar Rp 261.473.433,- atau 53,71%

e. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program ini memiliki total anggaran Rp. 1.312.277.000,- dan terealisasi Rp. 913.115.545,- indikator output dari program ini adalah Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. Ada satu Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah:

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi nilai realisasi fisik 93,24 persen dan capaian keuangan 69,58persen.

f. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini tidak berjalan karena refocusing

g. Program Hubungan Industrial

Program ini memiliki total anggaran Rp. 1.008.279.500,- dan terealisasi Rp. 703.319.292,- Ada dua Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah:

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten Kota dengan nilai realisasi fisik 94,58 persen dan capaian keuangan 69,75persen.
- 2) Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan dan pendaftaran di daerah Kabupaten/Kota dengan nilai realisasi fisik 83,00 persen dan capaian keuangan 56,15persen

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Keluaran yang Direncanakan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada satu program yang tidak memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan pada (Tabel 2).

a. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini tidak terlaksana karena refocussing anggaran.

Sementara itu, daftar usulan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2021 ini sudah tertuang di dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Program dan Kegiatan Pada DPA Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Pagu Dana Dalam DPAP	Keterangan
Urusan Penanaman Modal			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		6.628.869.981	DI AKOMODIR
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	24.712.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.795.935.241	
3	Administrasi barang Milik daerah	19.800.000	
4	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	71.378.500	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.717.400	
6	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.514.298	
7	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	936.265.042	
Program Promosi Penanaman Modal		78.591.000	DI AKOMODIR
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.863.050	
Program Pelayanan Penanaman Modal		179.799.354	DI AKOMODIR
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota	288.399.000	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		486.820.000	DI AKOMODIR
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	486.820.000	
Urusan Ketenagakerjaan			
Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		1.312.277.000	DI AKOMODIR
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.312.277.000	
Program Penempatan Tenaga Kerja		0	Kegiatan tidak dilaksanakan karena refofocusing anggaran
1	Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	0	
Program Hubungan Industrial		-	DI AKOMODIR
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.008.279.500	
2	Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	156.428.000	

Sumber: DPAP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021

B. Permasalahan/Hambatan dan Pemecahan Masalah

Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas masih menemui beberapa permasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Munculnya permasalahan tersebut tidak terlepas dari berbagai kelemahan internal maupun eksternal yang dialami masing-masing bidang di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Sebagai gambarannya, berikut diuraikan permasalahan atau hambatan dan sekaligus dikemukakan juga alternatif pemecahan masalahnya.

i. Bidang Penanaman Modal dan PTSP

a. Permasalahan

- 1) Aparatur di Bidang Penanaman Modal dan PTSP relatif masih kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sehingga pembinaan sektor ini masih sedikit terhambat.
- 2) Pada saat berlangsungnya kegiatan pengawasan dan pendataan izin terdapat beberapa persoalan, yaitu:
 - a) Banyaknya ditemukan Pedagang Usaha Menengah keatas yang belum memiliki izin.
 - b) Ditemukannya tumpang tindih antara izin yang dikeluarkan Pelayan Terpadu Satu Pintu dengan izin yang dikeluarkan oleh PATEN.
 - c) Kurang pemahaman pedagang maupun investor tentang jenis izin.
- 3) Belum tersedianya bank data yang bias dipertanggungjawabkan dengan baik.
- 4) Kurangnya media atau sarana informasi yang dapat diakses oleh Investor dalam mengakses Sumber Daya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Pemecahan Masalah

- 1) Perlunya memberikan usulan pada BKD agar merekrut/menambah jumlah personil yang memiliki latar belakang di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- 2) Solusi dari persoalan kegiatan peningkatan pengawasan dan Pendataan Izin, di antaranya:

- a. Adanya sanksi terhadap pedagang yang belum memiliki izin baik berupa sanksi teguran ataupun sanksi pidana.
 - b. Harus ada regulasi dan hubungan komunikasi yang baik antara pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pihak PATEN.
 - c. Harus ada sosialisasi ke pada pedagang dan investor tentang jenis perizinan secara bertahap.
- 3) Tersedianya bank data yang akurat tentang Bidang penanaman modal dan PTSP dengan selalu meng-update data-data yang ada secara terjadwal.
- 4) Membangun jaringan informasi *marketing* baik secara lisan, tertulis seperti brosur dan pamflet maupun informasi yang disampaikan melalui media elektronik (*social media*).
- ii. Bidang Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi
 - a. Permasalahan
 - 1) Terbatasnya alat penguji/pemeriksa perusahaan.
 - 2) Terbatasnya anggaran Daerah untuk pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
 - 3) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja sehingga menyulitkan dalam penempatan kerja.
 - 4) Masih banyaknya perusahaan yang belum mematuhi peraturan ketenagakerjaan.
 - 5) Masih kurangnya pegawai pengawas dan mediator dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan pembinaan penegakan hukum di perusahaan.
 - b. Pemecah Masalah
 - 1) Perlu adanya Peningkatan SDM dan sarana dan prasarana pada hubungan industrial sehingga dapat menguji perusahaan PMDN maupun PMA.
 - 2) Perlu adanya penambahan anggaran di bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian agar setiap urusan di laksanakan lebih optimal.
 - 3) Harus adanya pelatihan tenaga kerja secara berkala sehingga para calon pencari kerja mempunyai keahlian

- 4) Harus adanya tidak tegas terhadap perusahaan yang tidak mengikuti aturan yaitu berupa teguran tertulis maupun tidak pidana
- 5) Harus ada penambahan pegawai yang membidangi dan memahami tentang hubungan industrial.

C. ANALISIS KERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sub bab ini menjelaskan sejauh mana kesenjangan antara harapan dan realisasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja periode sebelumnya yaitu pada tahun 2011-2017. Dari segi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada uraian tugas, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi. Berikut ini merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil kegiatan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian paruh waktu dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021, maka jika dilihat dari dokumen Review RPJMD, indikator tingkat pengangguran terbuka dan indikator jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) memiliki capaian indikator sasaran berstatus hijau. Status hijau ini bermakna bahwa capaian tersebut telah sesuai jalurnya (*on the track*).

Indikator sasaran itu adalah sebagaimana terdapat dalam RPJMD periode sebelumnya yaitu 2011-2015 yang diamanatkan kepada Kantor Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penanggungjawab. Secara keseluruhan, terdapat 89 indikator sasaran dan meliputi seluruh bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

a. Kinerja Pelayanan Bidang Penanaman Modal dan Bidang PTSP

Dengan adanya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tanggal 28 November 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintah dibidang penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Maka semakin jelas bahwa Penanaman Modal dan PTSP bertugas mengembangkan penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi keamanan dan kepastian.

Untuk mengisi struktur organisasi tersebut maka diperlukan adanya sumber daya yang berkualitas. Tetapi jika dikaitkan dengan tuntutan tugas seperti diatas, maka masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu segera diatasi. Hal tersebut antara lain adalah kondisiter atas sumberdaya manusia masih belum memadai, sebagian pegawai belum memahami masalah penanaman modal dan perizinan secara detail serta sarana dan prasarana pendukung operasional kerja masih kurang, jasa dibidang pelayanan perizinan. Selain itu kebijakan penanaman modal baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang masih ditangani pusat merupakan kendala lainnya dalam menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Keberadaan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya meningkatkan penanaman modal dan peningkatan mutu pelayanan perizinan. Peningkatan pelayanan mutu perizinanakan lebih efektif tercapai apa bila ditunjang oleh kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan perizinan. Kelembagaan badan perizinan akan memiliki kewenangan dalam pengintegrasian jenis-jenis perizinan, penyusunan standar pelayanan yang mengacu pada SPM serta adanya kepastian hukum dalam pelayanan perizinan.

Peluang investasi akan terbuka lebar apabila pelayanan perizinan memiliki kepastian hukum. Dengan adanya PERBUP No. 13 Tahun 2015, ada 35 jenis perizinan dan 16 NonPerizinan.

Komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan kekuatan yang signifikan dalam mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah. Demikian pula potensi sumber daya alam, situasi dan kondisi keamanan yang kondusif serta dukungan masyarakat terhadap kegiatan investasi merupakan daya tarik tersendiri bagi para pemilik modal untuk berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kinerja keuangan DPMPTSP periode 2011-2018 berfluktuasi. Pada tahun 2011, rata-rata realisasi anggaran mencapai 63,40 persen. Tercatat pada tahun 2011 bahwa terdapat 3 program dengan realisasi serapan anggaran paling tinggi dengan realisasi mencapai 63,43 persen yaitu i) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, ii) Sementara untuk program dengan realisasi terendah adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan realisasi anggaran sebesar 63,39 persen.

Pada tahun 2012, kinerja keuangan DPMPTSP mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat hingga 14,74 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2012, rata-rata serapan anggaran sebesar 78,14 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan capaian realisasi mencapai 86,91 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan realisasi anggaran sebesar 68,1 persen.

Pada tahun 2013, kinerja keuangan DPMPTSP mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat hingga 17,65 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2013, rata-rata serapan anggaran sebesar 95,79 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan capaian realisasi mencapai 96,71 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi sebesar 94,91 persen.

Pada tahun 2014, kinerja keuangan DPMPTSP mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat tipis hingga 3,41 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2014, rata-rata serapan anggaran sebesar 99,20 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan capaian realisasi mencapai 98,61 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi sebesar 98,70 persen.

Pada tahun 2015, kinerja keuangan DPMPTSP mengalami Penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menurun hingga 14,79 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2015, rata-rata serapan anggaran sebesar 84,41 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian realisasi mencapai 86 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi capaian realisasi sebesar 82,82 persen.

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 kinerja keuangan DPMPTSP mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat bahwa pada tahun 2018, rata-rata serapan anggaran 99,00 Persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan capaian realisasi mencapai 99,94 Persen. Sementara Program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian realisasi sebesar 95 Persen.

Melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat diwujudkan pelayanan public secara menyeluruh di bidang investasi yang mampu memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dalam hal tersebut, tuntutan para pemangku kepentingan untuk memperoleh seluruh pelayanan investasi dan perizinan yang cepat, mudah serta transparan pada 1 (satu) tempat / PD yang didukung dengan kemudahan untuk

memperoleh akses informasi, jaminan dan perlindungan hukum serta kepastian untuk melakukan kegiatan usaha, *merupakan tuntutan yang tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan.*

Pada tahun 2012, kinerja keuangan DPMPTSP mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat hingga 36,14 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2012, rata-rata serapan anggaran sebesar 85,36 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian realisasi mencapai 91 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan realisasi anggaran sebesar 76,18 persen.

Pada tahun 2013, kinerja keuangan DPMPTSP mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat hingga 12,73 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2013, rata-rata serapan anggaran sebesar 98,09 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja dengan capaian realisasi mencapai 99,30 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan anggaran sebesar 95,77 persen.

Pada tahun 2014, kinerja keuangan DPMPTSP mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya itu menurun tipis hingga 2 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2014, rata-rata serapan anggaran sebesar 96,09 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan capaian realisasi mencapai 99,27 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja anggaran sebesar 93,92 persen.

Pada tahun 2015, kinerja keuangan DPMPTSP mengalami Peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat tipis hingga 0,07 persen. Tercatat bahwa pada tahun 2014, rata-rata serapan anggaran sebesar 96.16 persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan capaian realisasi mencapai 98,88 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar 93,44 persen.

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 DPMPTSP mengalami Peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat Tercatat bahwa pada tahun 2018, rata-rata serapan anggaran sebesar 99.00persen. Program dengan capaian realisasi tertinggi berhasil dicapai oleh Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan capaian realisasi mencapai 99,96 persen. Sementara program dengan realisasi capaian terendah yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja anggaran sebesar 97,15persen.

D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan capaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah serta kondisi kekinian, maka perlu diidentifikasi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal di lingkup OPD dalam rangka penentuan isu-isu strategis. Permasalahan dimaksud meliputi:

1. Permasalahan Internal

- a. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja masih kurang, sehingga pembinaan di Bidang pendataan dan pengawasan penanaman modal, serta penyelesaian kasus tenaga kerja belum maksimal.
- b. Lemahnya daya kontrol pemerintah di sektor penanaman modal, tenaga dan transmigrasi, sehingga mengakibatkan adanya distorsi mekanisme memperlambat perizinan dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.
- c. Rendahnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Kinerja pemerintah dalam pelayanan publik belum sesuai dengan standar pelayanan prima, seperti pelayanan yang cepat, tepat, ramah, transparan.

- e. Keterbatasan SDM masyarakat/ penduduk.
 - f. Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang masih terbatas dalam penyelenggaraan pelayanan publik
 - g. Belum adanya SDM Aparatur pelayanan di PTSP yang Mengikuti Pendidikan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan pelayanan publik
2. Permasalahan Eksternal
- a. Letak geografis antar pulau yang sulit terjangkau diperburuk lagi dengan iklim/keadaan cuaca yang kurang kondusif yaitu pada bulan-bulan tertentu, dimana laut tidak dapat dilayari oleh kapal yang bertonase kecil.
 - b. Aksesibilitas antar pulau relatif terbatas, akibat sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai.
 - c. Terdapat kesenjangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya
 - d. Adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan instansi lain.
 - e. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
 - f. Perkembangan dan kemajuan IPTEK yang sangat cepat

Selain permasalahan tersebut, juga terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Peluang dimaksud meliputi:

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota serta negara tetangga yang perkembangannya relatif lebih maju;
2. Dibukanya kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus (*Special Economic Zone*);
3. Adanya kebijakan otonomi daerah yang dapat diterapkan untuk memudahkan daerah dalam membuat peraturan daerah dan meningkatkan sektor Penanaman Modal dan Tenaga Kerja di Kepulauan Anambas;

4. Sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki potensi besar yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor;
5. Hasil perkebunan, pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi agroindustri yang lebih berdaya saing;
6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*;
7. Tekat pemerintah dan *stakeholders* untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien sehingga mutu pelayanan publik dapat ditingkatkan;
8. Adanya keinginan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan;
9. Potensi sumber daya alam yang dapat dikelola secara optimal;
10. Pendapatan dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat
11. Setiap kebijakan terkoordinasi dengan baik antara daerah, provinsi dan nasional;

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka isu-isu strategis daerah senantiasa berkembang sehingga perlu diidentifikasi secara berkesinambungan. Mengingat isu-isu strategis merupakan dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023. Adapun isu-isu strategis dimaksud meliputi:

1. Meningkatnya kemampuan aparatur di bidang manajemen administrasi perkantoran;
2. Tersedianya lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja melalui pemanfaatan potensi daerah;
3. meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap proses perizinan.
4. Kurangnya informasi pasar kerja;
5. Rendahnya penempatan tenaga kerja;
6. Masih rendahnya laporan kondisi Ketenagakerjaan oleh perusahaan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, kecamatan serta forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihadiri oleh masyarakat serta perangkat Desa/Kecamatan. Dari semua usulan yang terkumpul, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang diusulkan oleh masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Memasuki RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ada sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan, yang dikenal dengan NAWA CITA, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan idup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan system hokum yang bebas korupsi, bermatahat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, Efektif dan Terpercaya dan
9. Sinergi Pemrintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Adapun rancangan akhir tema pembangunan, dan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2023, sebagai berikut:

Rancangan Akhir Tema Pembangunan

“Pemulihan Ekonomi, Pengembangan Sumber daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur”.

Rancangan Akhir Prioritas Pembangunan :

1. Pemulihan Ekonomi yang berbasis sektor unggulan.
2. Peningkatan Kesejahteraan sosial dan SDM unggul yang berakhlakul karimah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana Infrastruktur yang berkualitas.
4. Birokrasi yang melayani dan inovatif, serta otonomi desa yang berdaya saing.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BKPM, Program dan Kegiatan BKPM Tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4 Program dan kegiatan BKPM 2020-2024

Program	Kegiatan
Program Penanaman Modal (Teknis)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal
	Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal
	Meningkatnya Kualitas Kerjasama Penanaman Modal
	Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal
	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
Program Dukungan Manajemen (Generik)	Terwujudnya ASN BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.
	Terkelolanya Anggaran BKPM yang akuntabel

Sumber: Renstra BKPM 2020-2024 dan Sumber lainnya

Seluruh Kegiatan di BKPM dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi Penanaman Modal. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja menghasilkan keluaran (output) yang dapat dilaksanakan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya sehingga hasil (outcome) dan dampak (impact) yang diharapkan dapat tercapai. Rangkaian kegiatan (activity) Keluaran (output, hasil (outcome) dan dampak (impact) untuk masing masing program adalah sebagai berikut:

a. Program Penanaman Modal

Dalam kerangka melaksanakan program Dukungan manajemen yang akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit lingkungan sekretariat BKPM untuk menghasilkan keluaran yang dapat diukur sehingga memperoleh hasil dan dampak yang diharapkan

b. Program Dukungan Manajemen

alam kerangka melaksanakan program Dukungan manajemen yang akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit lingkungan sekretariat BKPM untuk menghasilkan keluaran yang dapat diukur sehingga memperoleh hasil dan dampak yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan Negara berpendapatan tinggi pada tahun 2023, pembangunan ekonomi dipacu untuk lebih tinggi, eksklusif dan daya saing. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat dengan rata-rata 5,7-6,0%, pada periode 2020-2024 dengan kebutuhan investasi (PMTB) Rp 35.212,4 triliun–Rp.35.455,6. Kebutuhan Investasi disumbang oleh Pemerintah sebesar 7,6-9,1 %Triliun sementara sisanya dipenuhi oleh masyarakat dan swasta. Pada periode tersebut investasi dari sektor swasta berupa PMDN dan PMA secara kumulatif ditargetkan sebesar Rp. 4,983,2 triliun. Oleh karena itu BKPM sebagai salah satu lembaga yang bertugas mendorong PMDN dan PMA, menetapkan sasaran strategis BKPM Tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya realisasi Penanaman Modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dan melayani dalam rangka mewujudkan visi misi presiden dan wakil presiden serta tujuan BKPM Tahun 2020-2024. Sasaran strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 yaitu Peningkatan Inovasi dalam rangka pencapaian target Penanaman Modal serta peningkatan kualitas penanaman modal dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Dinas Penanaman modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas seperti yang dikemukakan sebelumnya, sejatinya visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur sebagaimana terlihat pada Tabel 7 Selanjutnya, tujuan yang akan diwujudkan tersebut dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan Dinas Penanaman modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas ini menggambarkan berbagai kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi di sektor

Penanaman Modal KetenagaKerjaan dan Ketrasmigrasian yang diakibatkan oleh kebijakantersebut.

Tujuan dan sasaran Renja pada DinasPenanaman modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun2023 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugasdan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra Periode 2016-2021. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktorkunci keberhasilan yang ditetapkan setelahpenetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah padaperumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-halyang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang bersifat spesifik,terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu **“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”**. Visi tersebut dapat dicapai melalui penerapan tujuh misi. Dari ketujuh misi tersebut, ada tiga poin yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Teanaga Kerja Periode 2021-2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakantelah dirumuskanmelalui berbagai faktor yang menjadipertimbangan. Mengacu pada visidan misiKabupatenKepulauanAnambas, program dan kegiatanDinaspenanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga KerjalebihmenitikberatkanpadaMenumbuhkembangkanKewirausahaanSerta MenciptakanIklimInvestasi yang Kondusif dan peningkatproduktivitastenagakerjamasih menjadi isu utamaSelainitu,rumusan program dan kegiatanjuga mempertimbangkanfaktorberikut:

1. Pencapaian*SustainableDevelopment Goals* (SDG's);
2. Program PengentasanKemiskinan;
3. PendayagunaanPotensiEkonomi Daerah
4. Efesiensiperizinan dan Nonperizinan

5. Meningkatkan daya tarik daerah
6. Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan perusahaan

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2023. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di sektor Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan berbanding lurus dengan tersedianya anggaran.

Berdasarkan target yang terdapat di dalam dokumen RPJMD 2021-2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja seperti terlihat pada Tabel 6. Dalam rangka penyesuaian pagu, Renja. Pada saat Rapat Koordinasi Penyesuaian pagu Renja Tahun Anggaran 2023, perangkat daerah ini mendapatkan anggaran sebesar 6 program dan 14 kegiatan dapat dilihat pada tabel 6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRASNMIGRASI DAN TENAGA KERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01			<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah</i>			8.124.070.000				7.593.304.998
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Perencanaan yang ditargetkan	KKA	20 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	48.032.900	DAU+DBH	-	40 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	24.712.000
2	18	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	5 dokumen yang targetkan	15.038.200	DAU+DBH	-	3 dokumen dari 6 dokumen yang targetkan	5.037.000
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KKA	1 Dokumen yang ditargetkan	5.000.000	DAU+DBH	-	2 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan	2.320.000
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KKA	1 Dokumen yang ditargetkan	5.000.000	DAU+DBH	-	2 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan	2.320.000

RANCANGAN RENCANA KERJA 2023

				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KKA	1 Dokumen yang ditargetkan	5.000.000	DAU+DBH	-	2 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan	2.320.000
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KKA	1 Dokumen yang ditargetkan	5.000.000	DAU+DBH	-	2 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan	2.320.000
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD	KKA	1 Dokumen yang ditargetkan	7.994.700	DAU+DBH	-	2 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan	7.397.000
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	1 Dokumen yang ditargetkan	5.000.000	DAU+DBH	-	2 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan	2.998.000
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	KKA	20 Persen dari 100 Persen yang di Targetkan	5.819.111.624	DAU+DBH	-	40 Persen dari 100 Persen yang di Targetkan	5.766.111.071
2	18	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	31 orang/bulan	5.589.891.624	DAU+DBH	-	100 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	5.541.475.071
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dokumen dari yang di targetkan	221.280.000	DAU+DBH	-	24 Bulan dari 60 Bulan yang di targetkan	221.280.000
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan dari 1 Laporan yang di targetkan	7.940.000	DAU+DBH	-	1 Dokumen dari 5 Dokumen yang di targetkan	3.356.000

#	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	KKA	100 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	19.800.000	DAU+DBH	-	100 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	19.800.000
				06	Penatausahaan Barang Milik Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	KKA	1 Laporan dari 1 Laporan yang di targetkan	19.800.000	DAU+DBH	-	24 Bulan dari 60 Bulan yang di targetkan	19.800.000
#	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat kedisiplinan Pegawai	KKA	100 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	118.659.000	DAU+DBH	-	100 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	271.378.500
				01	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	KKA	1 Unit dari 1 Unit yang di targetkan	6.830.000	DAU+DBH	-	1 Unit dari 5 Unit yang di targetkan	6.830.000
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	KKA	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	86.829.000	DAU+DBH	-	1 Paket dari 2 Paket yang di targetkan	64.548.500
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KKA	2 Orang dari 4 Orang yang di targetkan	25.000.000	DAU+DBH	-	2 Orang dari 4 Orang yang di targetkan	200.000.000
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	KKA	50 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	952.140.100	DAU+DBH	-	50 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	447.107.000
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	KKA	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	20.744.000	DAU+DBH	-	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	9.451.000
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	21.860.000	DAU+DBH	-	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	380.000
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	23.866.400	DAU+DBH	-	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	13.819.000

RANCANGAN RENCANA KERJA 2023

				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	KKA	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	48.629.700	DAU+DBH	-	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	47.449.000
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	27.000.000	DAU+DBH	-	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	43.730.000
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	KKA	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	5.400.000	DAU+DBH	-	1 Paket dari 1 Paket yang di targetkan	10.800.000
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan Tamu	KKA	1 Laporan dari 5 laporan yang di targetkan	15.000.000	DAU+DBH	-	1 Laporan dari 5 laporan yang di targetkan	12.500.000
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan dari 1 laporan yang di targetkan	789.640.000	DAU+DBH	-	1 Laporan dari 1 laporan yang di targetkan	308.978.000
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	KKA	20 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	25.000.000	DAU+DBH	-	40 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	24.609.000
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	KKA	1 Unit dari 1 Unit yang di targetkan	25.000.000	DAU+DBH	-	1 Unit dari 1 Unit yang di targetkan	24.609.000
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	KKA	20 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	950.948.876	DAU+DBH	-	40 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	919.319.927
2	18	1		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	KKA	1 laporan dari 10 Laporan yang di targetkan	64.119.500	DAU+DBH	-	1 laporan dari 10 Laporan yang di targetkan	56.636.500
2	18	1		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	KKA	1 laporan dari 10 Laporan yang di targetkan	5.000.000	DAU+DBH	-	1 laporan dari 10 Laporan yang di targetkan	2.800.000

				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	KKA	1 laporan dari 10 Laporan yang di targetkan	881.829.376	DAU+DBH	-	1 laporan dari 10 Laporan yang di targetkan	859.883.427
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	190.377.500	DAU+DBH	-	100 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	120.267.500
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	KKA	17 Unit dari 20 Unit yang ditargetkan	47.667.500	DAU+DBH	-	17 Unit dari 20 Unit yang ditargetkan	45.667.500
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	KKA	62 Unit dari 70 Unit yang ditargetkan	47.320.000	DAU+DBH	-	62 Unit dari 70 Unit yang ditargetkan	26.000.000
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Sarana	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	KKA	100 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	95.390.000	DAU+DBH	-	100 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	48.600.000
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rasio peningkatan Investasi PMDN dan PMA			680.000.000				700.000.000
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	Terlaksananya Peta Potensi Investasi	KKA	1 Dokumen yang ditargetkan	680.000.000	DAU+DBH	-	1 Dokumen yang ditargetkan	700.000.000
				02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	KKA	1 Dokumen yang di Targetkan	680.000.000	DAU+DBH	-	1 Dokumen yang di Targetkan	700.000.000

2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi di Daerah			403.000.000				398.000.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Minat Investor dan dunia Usaha untuk berinvestasi di kabupaten Kepulauan anambas	KKA	1 Dokumen yang ditargetkan	403.000.000	DAU+DBH	-	1 Dokumen yang ditargetkan	398.000.000
				01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	1 Dokumen yang di Targetkan	123.000.000	DAU+DBH	-	1 Dokumen yang di Targetkan	123.000.000
				02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	KKA	1 Dokumen yang di Targetkan	280.000.000	DAU+DBH	-	1 Dokumen yang di Targetkan	275.000.000
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Penanaman Modal			1.129.832.000				1.020.823.000
2	18	04	2.01		Pelayan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu	KKA	50 Persen dari 73 Persen yang ditargetkan	1.129.832.000	DAU+DBH	-	100 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	1.020.823.000
				01	Penyediaan Pelayan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayan Perizinan Usaha Berintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	KKA	Jumlah pelaku usaha Perizinan dan Non Perizinan di Terbitkan	550.332.000	DAU+DBH	-	Jumlah pelaku usaha Perizinan dan Non Perizinan di Terbitkan	560.332.000

				02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	KKA	20 kegiatan usaha yang yang di Targetkan	230.000.000	DAU+DBH	-	20 kegiatan usaha yang yang di Targetkan	110.574.000
				03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan Non perizinan	KKA	60 pelaku usaha yang yang di Targetkan	149.500.000	DAU+DBH	-	60 pelaku usaha yang yang di Targetkan	149.917.000
				04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha ydari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian Fasilitas/insentif Daerah	KKA	5 Kegiatan Usaha yang yang di Targetkan	200.000.000	DAU+DBH	-	5 Kegiatan Usaha yang yang di Targetkan	200.000.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah PMA dan PMDN			696.598.000				385.838.000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	KKA	100 Persen dari 100 Persen yang ditargetkan	696.598.000	DAU+DBH		1 Kali yang di Targetkan	385.838.000
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	KKA	11 Kegiatan usaha dari 20 Kegiatan usaha yang ditargetkan	150.000.000	DAU+DBH		11 Kegiatan usaha dari 20 Kegiatan usaha yang ditargetkan	150.000.000

RANCANGAN RENCANA KERJA 2023

				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	KKA	212 Pelaku usaha dari 250 Pelaku usaha yang ditargetkan	287.745.000	DAU+DBH	212 Pelaku usaha dari 250 Pelaku usaha yang ditargetkan	115.838.000
				03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha ang melakkan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	KKA	17 kegiatan dari 25 kegiatan yang ditargetkan	258.853.000	DAU+DBH	17 kegiatan dari 25 kegiatan yang ditargetkan	120.000.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data berbasis sistem informasi			125.000.000			150.000.000
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan kualitas pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	KKA	1 Kali yang di Targetkan	125.000.000	DAU+DBH	1 Kali yang di Targetkan	150.000.000
				01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berintegrasi secara Elektronik	jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	KKA	1 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan	125.000.000	DAU+DBH	1 Dokumen dari 5 Dokumen yang ditargetkan	150.000.000
JUMLAH PAGU									11.158.500.000			10.247.965.998

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


YUNIZAR, SE, M.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199803 1 009

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Tahun Anggaran 2023, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tabel 4.1. Program/Kegiatan/SubKegiatan Tahun 2023

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan
1	2	3
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Capaian Kinerja Perangkat Daerah
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditargetkan
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya jumlah evaluasi Kinerja perangkat daerah
2.18.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi
2.18.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN
2.18.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
2.18.01.2.02.03	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.18.01.2.03	<i>Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.18.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Jumlah Tingkat disiplin Pegawai
2.18.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin pegawai	Jumlah Unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin Pegawai
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
2.18.01.2.05.10	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan
2.18.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah Layanan Administrasi Umum
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.18.01.2.06.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.18.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.18.01.2.07	<i>Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</i>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah
2.18.01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor/bangunan	Jumlah unit gedung Kantor atau bangunan lainnya
2.18.01.2.08	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah</i>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah daerah
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2.18.01.2.08.03	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan
2.18.01.2.09	<i>Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah</i>	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
2.18.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara
2.18.01.2.09.03	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta potensi investasi Kabupaten/Kota
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta potensi investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2.18.02.2.02.01	Penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha kabupaten kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/Kota
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta potensi investasi Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.01	Penyusunan strategi Penanamn Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan promosi penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman Modal KKA
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Penanaman Modal
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kota
2.18.04.2.01.01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
2.18.04.2.01.02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman Modal
2.18.04.2.01.03	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan Pemberian Fasilitas/insentif daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan Pemberian Fasilitas/insentif daerah
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Penanaman Modal
2.18.05.2.01	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman Modal
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman Modal
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman Modal

2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
2.18.06.2.01	<i>Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kepulauan anambas</i>	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan non perizinan berbasis system	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah dikaji dan dimanfaatkan

Adapun pendanaan Program dan Kegiatan diatas direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2023. Renja Tahun 2023 ini masih mempedomani Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Periode 2021-2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah ini dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi bidang Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja ini. Semoga Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 yang sekaligus merupakan awal dari pelaksanaan RPJMD tahap kedua periode 2021-2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

Tarempa, 7 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



YUNIZAR, SE, M.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19700623 199803 1 009